

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Umumnya negara-negara berkembang berkeyakinan bahwa sektor industri mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian, dengan asumsi bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Begitu juga dengan Indonesia, di Indonesia sektor industri dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (*the leading sector*) terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya, selain akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengannya (Saragih, 2004). Menurut Lewis (Todaro dan Smith, 2006), Pertumbuhan dan Perkembangan suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja di pihak lain.

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan satu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai pembangunan saja (Sadono Sukirno, 2000). Untuk mencapai tujuan dan aspirasi yang diamanatkan dalam UUD 1945, strategi dan kebijakan pembangunan sektor

industri harus tetap dilakukan bersama dengan sektor-sektor dan bidang-bidang lain dalam ruang lingkup strategi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Dumairy, 1997).

Industri pengolahan adalah industri yang strategis. Industri ini di pandang mampu mendorong perekonomian indonesia yang sedang berkembang. Dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang melimpah, maka sektor industri pengolahan diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Sektor industri pengolahan sendiri terbagi dalam empat kelompok, yaitu industri kecil, sedang, dan besar, serta industri kerajinan rumah tangga.

Menurut Hirschman, pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dulu. Dalam sektor produksi mekanisme pendorong pembangunan (*inducement mechanisme*) yang tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai industri dalam menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah bagi industri lainnya, dibedakan menjadi dua macam yaitu pengaruh keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect*) dan pengaruh keterkaitan ke depan (*forward linkage effect*). Pengaruh keterkaitan ke belakang maksudnya tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri lainnya. Sedangkan pengaruh keterkaitan ke depan adalah tingkat rangsangan yang dihasilkan oleh industri yang pertama bagi input mereka (Arsyad, 1999).

Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa. Sebagai misal pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi suatu industri. Dengan adanya industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa. Sejalan dengan hal tersebut maka peran sektor industri semakin penting, sehingga sektor industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau

Leading Sektor, peranan sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah terlihat dalam kontribusi atau sumbangan sektor industri dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut (Dumairy, 1997).

Provinsi Maluku Utara sendiri sebagai provinsi yang memiliki berbagai potensi pengembangan baik dari segi infrastruktur, potensi pasar, tenaga kerja, dan sumberdaya alam telah mengalami pertumbuhan pada berbagai sektor ekomi. Pertumbuha tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya PDRB Provinsi Maluku Utara. Tabel 1.1 menunjukkan gambaran perkembangan PDRB Provinsi Maluku Utara dari tahun 2010 s.d 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat, Perbandingan antara 17 sektor, dan industri Pengolahan berada pada peringkat ke tiga setelah pertanian dan pertambangan.

Tabel 1.1. Distribusu Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha (Persen) Tahun 2010-2017

Lapangan Usaha (subkategori)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.27.00	25.90	26.08.00	25.75	25.77	24.84	24.96	1,024306
B. Pertambangan dan Penggalian	13.57	13.44	0,547917	0,524306	09.36	0,386806	08.39	09.18
C. Industri Pengolahan	0,254861111	05.34	05.13	05.08	05.23	05.10	05.39	06.43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	00.06	00.06	00.05	00.05	00.05	00.07	00.09	00.10
E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	00.09	00.08	00.08	00.08	00.08	00.08	00.08	00.08
F. Konstruksi	0,263888889	0,263889	06.14	0,275	06.17	06.59	0,291667	0,293056
G. Perdagangan Besar dan Eceran	15.04	15.10	15.26	0,680556	16.56	17.38	0,753472	17.42
H. Transportasi dan Pergudangan	05.38	05.15	05.24	0,25	0,276389	06.13	06.21	06.26
I. Penyediaan Akomodasi, Makan Minum	05.38	05.15	05.24	0,25	0,276389	06.13	06.21	06.26
J. Informasi dan Komunikasi	0,176388889	0,16875	03.54	03.54	0,175	0,175	0,174306	0,170139
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	02.05	02.58	0,142361	0,148611	0,144444	0,151389	03.16	03.13
L. Real Estate	00.11	00.11	00.11	00.11	00.11	00.11	00.11	00.11
M. Jasa Perusahaan	00.33	00.32	00.31	00.32	00.32	00.32	00.32	00.32
O. Administrasi Pemerintahan	15.15	0,688194	16.11	16.37	17.13	17.09	16.32	0,68125
P. Jasa Pendidikan	03.46	03.40	03.30	03.29	03.34	03.50	0,170833	0,170139
Q. Jasa Kesehatan	2	0,108333	0,10625	0,110417	02.11	02.11	02.09	02.05
R. Jasa Lainnya.	0,057638889	0,053472	0,052083	0,050694	0,051389	0,054167	0,054861	0,053472

Sumber: Bps Provinsi Maluku Utara, tahun 2013, Tahun 2018

Menurut Okun, terdapat hubungan yang negatif antara Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Pengangguran (Mankiw, 2007). Pada skala wilayah yang lebih kecil, total pendapatan dan total pengeluaran pada output barang dan jasa di sebut sebagai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Perubahan pada PDRB riil dari tahun ke tahun erat kaitannya dengan perubahan tingkat pengangguran atau meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian. Jumlah industri berhubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Dimana banyaknya jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu industri. (karib, 2012)

Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga di pengaruhi oleh investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2008) menunjukkan bahwa iklim investasi yang baik akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pertumbuhan sektor industri dan pada akhirnya akan berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan. Memperbaiki iklim investasi merupakan salah satu tonggak dari strategi pembangunan. Namun, industri yang bersifat padat modal membuat investasi yang ditanamkan cenderung dipergunakan untuk pembelian modal yang berupa mesin-mesin canggih sehingga pada akhirnya industri tidak banyak menggunakan banyak tenaga kerja.

Gambar 1. 1. Perkembangan TPT dan TPAK di Provinsi Maluku Utra Tahun 2013-2017



Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2015, Tahun 2018

Perkembangan indikator Ketenagakerjaan di Maluku Utara masih menunjukkan pertumbuhan yang baik. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 67,83% pada february 2016 menjadi 69,48% di February 2017. Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Justru mengalami peningkatan menjadi 4,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,43%. Meskipun terjadi peningkatan TPT namun, Penyerapan Tenaga kerja yang tercermin pada TPAK masih menunjukkan angka yang lebih tinggi, artinya pertumbuhan perekonomian yang berlangsung

di Maluku Utara masih memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teori, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja. Hal ini menjadi permasalahan sendiri di Maluku Utara yang perlu untuk dicari solusinya. Penyediaan lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia juga mutlak di perlukan karena merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk bisa terserap di sektor ini dan menciptakan tenaga kerja yang efektif akan menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar.

Permasalahan penyediaan kesempatan kerja di Maluku Utara menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Maluku Utara meningkat. Sektor industri yang memiliki nilai tambah cukup besar diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih luas. Sektor industri pengolahan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi di Maluku Utara itu sendiri, Sektor industri Pengolahan juga memiliki peranan yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi ini. Maluku Utara sebagai pusat pengembangan sumber daya alam (SDA) berbasis energi bersih karena provinsi ini memiliki kekayaan SDA melimpah baik pertambangan logam, perikanan, pertanian, maupun potensi panas bumi. Selain potensi-potensi tersebut, Maluku Utara juga memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “**Pengaruh Sektor Industri Pengolahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Maluku Utara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penulisan Proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah nilai output sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah jumlah industri pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara?
3. Apakah nilai investasi sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun Tujuan dari penulisan Proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai output sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah nilai investasi sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Khairun, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi.
2. Untuk memperkaya wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni serta dapat mengaplikasikannya secara kontekstual.
3. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik untuk meneliti masalah penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan.

